



SALINAN

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR: 03, TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2008 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2014 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2016 Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 18);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2019-2023.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kota Padang Sidempuan Tahun 2020 Nomor 56) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 24 Desember 2021

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 24 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,**

Ttd.

**LETNAN
BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 83**



LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA PADANG SIDEMPUNAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN

WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN TAHUN

2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN

SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Peningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2 Indeks Pendidikan	3 $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0	4 Dinas Pendidikan	5 BPS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Ket: AHH = Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan	BPS
Meningkatnya kualitas perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - \text{laki}} \times 100$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPS
Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Tingkat Pemuda Kegiatan Ekonomi Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda Daerah}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	BPS
Meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat	PDRB per Kapita	$\frac{PDRB \text{ ADH Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BPS
	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penganggur terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	BPS
Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} x (Fc_i + Fc_i - 1)$	Dinas Sosial; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BPS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3	4		
1	2	3	4	5	5
Meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas unggulan daerah		Ket: GR = Koefisien Gini fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i Fci = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)	Daerah		
	Indeks Pengeluaran	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$	Dinas Sosial; Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BPS	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Perdagangan Besar dan Eceran $\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	BPS	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Industri Pengolahan	Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan $\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	BPS	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	BPS	

ASASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Pertanian $Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: IHKt = Indeks harga konsumen periode saat ini IHKt-1 = Indeks harga konsumen periode sebelumnya		
	Inflasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BPS
Meningkatnya potensi dan daya tarik pariwisata daerah	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	$\frac{PDRB_{(IP)}}{PDRB_{Total}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga berlaku IP= Kategori Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	BPS
Terciptanya iklim investasi daerah yang kondusif	Tingkat Pertumbuhan Investasi	$\frac{Nilai Investasi_t - Nilai Investasi_{t-1}}{Nilai Investasi_{t-1}} \times 100\%$ Ket: t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar	Indeks Konektivitas Wilayah	$\beta = \frac{e}{v}$ Ket:	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Masyarakat Kota	Persentase Luas Kawasan Kumuh	$\beta = \text{Indeks Konektivitas}$ $e = \text{Jumlah ruas jalan (link)}$ $v = \text{Jumlah kota atau titik simpul (node)}$ $\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Masyarakat Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$ Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Masyarakat Kota	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Penilaian LkjIP oleh Kementerian PAN dan RB	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Masyarakat Kota	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Keuangan Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																									
1	2	3 antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00-1,75</td><td>25-43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1,76-2,50</td><td>43,76-62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2,51-3,25</td><td>62,51-81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,26-4,00</td><td>81,26-100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik	4	5
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																									
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																									

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PADANG SIDEMPUAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

SIDEMPUAN TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. DINAS PENDIDIKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Meningkatnya Minat Penduduk mengikuti Jenjang Pendidikan	2 Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	3 $\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 - 12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$	4 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	5 Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 - 15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 4 - 6 Tahun dijenjang PAUD/TK/RA}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 4 - 6 Tahun}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 15- 21 tahun yang berpartisipasi dalam	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 - 21 Tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 - 21 Tahun yang pernah/Sedang bersekolah}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	pendidikan kesetaraan			
Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Dasar	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
	Tingkat Kelulusan SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
	Tingkat Kelulusan SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jlh siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Pengelolaan Kebudayaan, Kesenian Tradisional dan Cagar Budaya	Persentase Organisasi Kebudayaan yang Terbina	$\frac{\text{Jumlah organisasi kebudayaan yang terbina}}{\text{Jumlah organisasi kebudayaan yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan
	Persentase Sanggar Seni yang Terbina	$\frac{\text{Jumlah sanggar seni yang terbina}}{\text{Jumlah sanggar seni yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan
	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan
	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Pendidikan	Inspektorat Kota Padang Sidempuan
Meningkatnya kinerja aparaturnya Dinas Pendidikan Kota PADANG SEMPUNAN				

2. DINAS KESEHATAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	$AKBa = \frac{D_{0-5th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: D_{0-5th} =Jumlah Kematian Anak berusia 0-5 tahun (belum tepat 5 tahun) pada satu tahun tertentu di daerah tertentu. P = Jumlah penduduk berusia 0-5 tahun pada pertengahan tahun tertentu di daerah tertentu K = Konstanta (1000)	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ $AKHB = (1 - AKB)$ Dimana: 1 = Per 1000 kelahiran AKB = Angka Kematian Bayi/Infant Mortality Rate (IMR) D_{0-1th} =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{\text{jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0-1bln}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: D_{0-1bln} =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu. $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	Angka Prevalensi balita stunting	Indeks Tinggi Badan Menurut Umur $\left(\frac{\text{Tinggi Badan}}{\text{Umur}} \right)$ Pendek $-3,0 \text{ SD}$ s/d $-2,0 \text{ SD}$ Sangat Pendek $< -3,0 \text{ SD}$ - Jika di masyarakat ditemukan 20% atau lebih merupakan masalah Gizi Masyarakat → Prevalensi Stunting - Stunting/pendek : Gabungan sangat pendek dan pendek	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Menurunnya angka kesakitan	Angka kesakitan	Jumlah Total Penyakit di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun $\frac{\text{Jumlah Penduduk di wilayah tersebut}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayah tersebut}} \times 100 \%$ dan pada kurun waktu yang sama	Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P)	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Kesehatan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya ruas jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap $\frac{\text{Jumlah total panjang jalan kota}}{\text{Jumlah total panjang jalan kota}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	Dinas PUTR
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur keciptakaryaan	Persentase RT yang terakses air minum	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses air minum}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$ Persentase RT yang terakses sanitasi $\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	Dinas PUTR
			Bidang Cipta Karya	Dinas PUTR

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya layanan Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah kumulatif Bangunan Gedung yang dibangun dan direhabilitasi	$\sum$ (Bangunan Gedung yang dibangun + Bangunan Gedung yang direhabilitasi)	Bidang Cipta Karya	Dinas PUTR
	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik}}{\text{jumlah total panjang saluran irigasi}} \times 100\%$	Bidang Sumberdaya Air	Dinas PUTR
	Jumlah kumulatif lokasi pembangunan dek dan bronjong yang dibangun dan direhabilitasi	$\sum$ (dek yang dibangun + dek yang direhabilitasi + bronjong yang dibangun + bronjong yang direhabilitasi)	Bidang Sumberdaya Air	Dinas PUTR
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	Bidang Penataan Ruang	Dinas PUTR
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang Sidempuan	Nilai LKJIP/LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase rehabilitasi rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di Kota Padang Sidempuan}} \times 100\%$	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Sidempuan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	$\frac{\text{Jumlah konflik sengketa tanah garapan yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh konflik sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penanganan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertarikan, Ketertiban, dan Keindahan)	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertarikan, Ketertiban, dan Keindahan) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertarikan, Ketertiban, dan Keindahan)}} \times 100\%$	Bidang Trantubum	Satpol PP
Meningkatnya Penegakan Perda Dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan masyarakat dan petugas}} \times 100\%$	Bidang PUD	Satpol PP
Meningkatnya kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Satpol PP	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Meningkatnya layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terhadap dampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia (non kebakaran)	2 Persentase layanan penanggulangan kebakaran oleh petugas dalam waktu tanggap (<i>Response time rate</i>)	3 Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) oleh Dinas (petugas pemadam dan penyelamatan) $\times 100\%$ Jumlah kasus kebakaran	4 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padang Sidempuan	Nilai LAKIP LKjIP/Nilai	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota PADANG SIDEMPUAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

7. DINAS SOSIAL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	2 Persentase Penurunan PPKS	3 $\frac{\text{Jumlah KPM Graduasi}}{\text{Jumlah Penerima Bansos Bersyarat}} \times 100\%$	4 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	5 Dinas Sosial
Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	$\frac{\text{IPS Perorangan} + \text{IPS Lembaga}}{2}$	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Sosial	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Sosial	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Resiko Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang Rentan Bencana}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
Meningkatnya Respon Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Bencana dalam waktu Tanggap	$\frac{\text{Jumlah Bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100\%$	Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD
Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana Yang Sesuai Kelayakan Dan Keselamatan	$\frac{\text{Jumlah penanganan pasca bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian pasca bencana}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD
Meningkatnya kinerja aparatur Penanggulangan Bencana Daerah Kota PADANG SIDEMPUN	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun	BPBD	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun

9. DINAS KETENAGAKERJAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$	Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
Perlindungan dan Peningkatan kesejahteraan pegawai	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	Bidang Pendataan dan Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Aparatur Ketenagakerjaan Kota PADANG SIDEMPUN	Nilai LAKIP LKjIP/Nilai	Laporan hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun	Dinas Ketenagakerjaan	Inspektorat Daerah Padang Sidempun

10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi Angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Dinas Tenaga Kerja
Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Rasio/Persentase Perempuan yang duduk dalam jabatan (JPT,Administrator dan Pengawas) di Lingkup Pemda	$\frac{\text{Jumlah Perempuan dalam jabatan eselon II}}{\text{Jumlah seluruh jabatan eselon II}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan	BKPSDM
Menurunnya kekerasan terhadap Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak (0-18 th)	$\frac{\text{Jumlah Perempuan korban kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan} \geq 18\text{th}} \times 10.000$	Bidang Pemberdayaan Perempuan	P2TP2A UPPA Polres Instansi terkait
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat KLA/Nilai KLA	$\frac{\text{Jumlah Anak yang memerlukan PK}}{\text{Jumlah Anak (0 - 18th)}} \times 10.000$ Berdasarkan Penilaian 24 indikator KLA (ditetapkan Kemen PP PA) Nilai maksimal 1.000	Bidang Perlindungan Anak	P2TP2A UPPA Polres Instansi terkait Kementerian Pemberdayaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas PP PA	Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Sekretarias Dinas PPPA	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

11. DINAS KETAHANAN PANGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatkan ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100\%$	Bidang Ketersediaan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatkan akses dan keterjangkauan pangan	Persentase keterisian lumbung pangan	$\frac{\text{Lumbung Pangan yang terisi sesuai dengan kapasitasnya}}{\text{Kapasitas seluruh lumbung pangan}} \times 100\%$	Bidang Distribusi dan cadangan pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di daerah rawan pangan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Manfaat KRPL}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yang ada di Daerah Rawan Pangan \& Locus Stunting}} \times 100\%$	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Ketahanan Pangan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Nilai Indeks kualitas air sungai sesuai baku mutu kls II	$Ipj = \sqrt{\frac{Ci}{Lij}^2 M + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2 R}$	Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan	Dinas Lingkungan Hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
hidup	dan memenuhi target capaian IKA nasional	Keterangan : - Ci / Lij M = nilai maksimum dari Ci / Lij - Ci / Lij R = nilai rata-rata dari Ci/Lij	Kapasitas	
	Nilai Indeks kualitas udara memenuhi target capaian IKU nasional	Indeks Kualitas Udara = $100 - (50/0,9 \times (ieu-0,1))$	Bidang Petaaan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase luas RTH dan memenuhi target capaian IKTL nasional	Keterangan : - Ieu = rata-rata (SO ₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO ₂ Ref EU dan NO ₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO ₂ Ref EU) IKTL = $100 - ((84,3-(TL \times 100)) \times 50/54,3)$ Keterangan : - IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan - TL = Tutupan Lahan	Bidang Petaaan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja Dinas Kota PADANG SEMPURAN	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sempuran	Bidang Petaaan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Inspektorat Daerah Kota Padang Sempuran

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase masyarakat yang memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan dn pencatatan sipil $\frac{\text{jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil}}{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan dn pencatatan sipil}} \times 100$ (KK, KTP, KIA, AK 00 – 18, AKM, AP, AC)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja Dinas dan aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota PADANG SEMPUN	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sempun	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Inspektorat Daerah Kota Padang Sempun

14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa maju status	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kinerja Dinas aparat Pemberdayaan Masyarakat dan Kota PADANG SEMPUN	Nilai LKjIP/ Nilai LAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sempun	Dinas PMD	Inspektorat Daerah Kota Padang Sempun

15. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Menurunkan Angka kelahiran pada wanita usia subur	2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	3 $mCPR = \frac{\text{Peserta KB aktif}}{\text{Pasangan usia subur}} \times 100\%$	4 Bidang Pengendalian penduduk	5 DPPDKB
Meningkatnya kinerja aparatur Pengendalian dan KB	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Dalduk dan KB	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

16. DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Meningkatnya kualitas dan kelayakan angkutan umum	2 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	3 Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	4 UPTD PKB	5 UPTD PKB
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas lalu lintas angkutan jalan	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/ Kota kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan kondisi Baik Tahun } n}{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan Tahun } n} \times 100\%$	Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perhubungan
Penataan lyn/trayek angkutan umum	Rasio Ijin Trayek	$\frac{\text{Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase tersedianya Fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia $\times 100\%$ Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	Bidang Prasarana dan Sarana	Kepala Terminal
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Perhubungan PADANG SIDEMPUN	Nilai LKJIP / Nilai LAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun	Dinas Perhubungan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kuantitas pelayanan informasi publik yang transparan	Skor keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang terpublikasi $\times 100\%$ Jumlah Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya pemerataan jaringan internet di desa	Persentase desa yang memiliki koneksi internet	Jumlah desa yang memiliki koneksi internet $\times 100\%$ Jumlah Desa	Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika / Provider Jaringan
Meningkatnya pengelolaan data statistik yang tepat waktu pada setiap OPD	Persentase data statistik OPD yang tepat waktu	Jumlah OPD yang menyampaikan data tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah OPD	Bidang Pengelolaan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Sumber Daya Pengelola keamanan informasi dan persandian	Persentase OPD yang menerapkan pengamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM OPD yang Mengikuti Pelatihan Pengamanan Informasi $\times 100\%$ Jumlah SDM Operator OPD	Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Komunikasi Informatika Daerah Kota	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun	Diskominfo	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
PADANG SIDEMPUNAN				

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																									
1	2	3	4	5																									
Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Realisasi PMA & PMDN	PMA Tahun n + PMDN Tahun n	Bidang Pengendalian, Pengaduan Kebijakan Informasi dan Pelaporan Layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																									
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai}}{\text{penimbang}}$ Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00-1,75</td><td>25-43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1,76-2,50</td><td>43,76-62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2,51-3,25</td><td>62,51-81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,26-4,00</td><td>81,26-100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik																									
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																									
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																									
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																									
Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas	Nilai LKjIP/Nilai	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempunan	Dinas Penanaman Modal dan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempunan																									

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN				PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																									
Peningkatan kinerja daerah	Nilai Sakip pada komponen pelaporan	<table><tr><th>No</th><th>Komponen Yang Dinilai</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25</td></tr><tr><td>3.</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>5</td><td>Evaluasi Kinerja</td><td>10</td></tr></table>				No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	1.	Perencanaan Kinerja	30	2.	Pengukuran Kinerja	25	3.	Capaian Kinerja	20	4.	Pelaporan Kinerja	15	5	Evaluasi Kinerja	10	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kemendagri							
No	Komponen Yang Dinilai	Bobot																														
1.	Perencanaan Kinerja	30																														
2.	Pengukuran Kinerja	25																														
3.	Capaian Kinerja	20																														
4.	Pelaporan Kinerja	15																														
5	Evaluasi Kinerja	10																														
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	<table><tr><th>No</th><th>Skor Kinerja</th><th>Status Kinerja</th></tr><tr><td>1.</td><td>1.00-1.80</td><td>Sangat Rendah</td></tr><tr><td>2.</td><td>1.81-2.60</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>3.</td><td>2.61-3.40</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4.</td><td>3.41-4.20</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>5.</td><td>4.21-5.00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr></table>				No	Skor Kinerja	Status Kinerja	1.	1.00-1.80	Sangat Rendah	2.	1.81-2.60	Rendah	3.	2.61-3.40	Sedang	4.	3.41-4.20	Tinggi	5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kemendagri							
No	Skor Kinerja	Status Kinerja																														
1.	1.00-1.80	Sangat Rendah																														
2.	1.81-2.60	Rendah																														
3.	2.61-3.40	Sedang																														
4.	3.41-4.20	Tinggi																														
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi																														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai IKM	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{1}$ Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25 <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-1,75</td><td>25-43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76-2,50</td><td>43,76-62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51-3,25</td><td>62,51-81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26-4,00</td><td>81,26-100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>				Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik	2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Hasil Survei
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																												
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik																												
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																												
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																												
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																												
Meningkatnya kinerja aparatur Sekretariat	Nilai LKjIP/Nilai	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan				Sekretariat Daerah	Inspektorat Daerah Kota																									

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	LAKIP		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

19. DINAS PERPUSTAKAAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya minat membaca masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	$\text{TKMM} = \frac{\text{Persentase ketercukupan koleksi} + \text{persentase pemanfaatan perpustakaan} + \text{persentase ketercukupan tenaga perpustakaan} + \text{persentase perpustakaan sesuai standar nasional}}{\text{TKMM} = \text{Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat}}$	Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
Meningkatnya SDM Aparatur dalam Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan SDM pengelola kearsipan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan}} \times 100\%$ Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Arsiparis 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan 3. Sosialisasi Kearsipan	Bidang Arsip	Dinas Perpustakaan
Meningkatnya Ketersediaan Arsip di Perpustakaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyerahkan Dinamis dan Statis untuk disimpan di Perpustakaan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (Termasuk Bagian) yang telah menyerahkan Arsip Dinamis dan Statis}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bidang Arsip	Dinas Perpustakaan
Meningkatnya kinerja Dinas	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Perpustakaan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Potensi dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan Jumlah Wirausahaan Muda	Peningkatan Jumlah Wirausahaan Muda dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya		
	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada Event Olahraga Se-Sumut	Bidang Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya Pengelolaan Pariwisata Lokal Daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Indonesia	Bidang Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Dinas Pariwisata	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

21. DINAS PERTANIAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya produksi pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan/tahun	$\frac{(\text{Jumlah produksi padi tahun } n - \text{jlh produksi padi tahun } n - 1)}{\text{Jumlah produksi padi thn } n - 1} \times 100\%$	Bidang TPH	Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan produksi peternakan/tahun	$\frac{(\text{Jumlah produksi daging tahun } n - \text{jlh produksi daging tahun } n - 1)}{\text{Jumlah produksi daging thn } n - 1} \times 100\%$	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Meningkatnya produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	$\frac{(\text{Jumlah produksi ikan tahun } n - \text{jlh produksi ikan tahun } n - 1)}{\text{Jumlah produksi ikan tahun } n - 1} \times 100\%$	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing komoditas produk pertanian dan perikanan	Persentase komoditas komoditas produk pertanian dan perikanan yang dipromosikan	$\frac{\text{Jumlah komoditas pertanian dan perikanan yg dipromosikan}}{\text{Jumlah total komoditas pertanian dan perikanan}} \times 100\%$	Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pertanian	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Hasil penilaian yang dikeluarkan Inspektorat Kota Padang Sidempuan	Dinas Pertanian	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

22. DINAS PERDAGANGAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kontribusi Sektor ,Perindustrian dan Perdagangan terhadap Perekonomian daerah	Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Perdagangan}}{\text{Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } n - 1}{\text{Jumlah IKM tahun } n - 1} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Berdasarkan RAT, Volume dan Aset}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	Bidang Koperasi UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kinerja aparatur Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Hasil penilaian yang dikeluarkan Inspektorat Kota Padang Sidempuan	Dinas Perdagangan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

23. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG SEMPURNA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																																										
1	2	3	4	5																																																										
Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks RB	<table><tr><th colspan="2">KOMPONEN PENILAIAN</th></tr><tr><td colspan="2">A. PENGUNGKIT</td></tr><tr><td>I. Pemenuhan</td><td>20</td></tr><tr><td>1. Manajemen Perubahan</td><td>2</td></tr><tr><td>2. Deregulasi Kebijakan</td><td>2</td></tr><tr><td>3. Penataan dan Penguatan Organisasi</td><td>3</td></tr><tr><td>4. Penataan Tata Laksana</td><td>2,5</td></tr><tr><td>5. Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>3</td></tr><tr><td>6. Penguatan Akuntabilitas</td><td>2,5</td></tr><tr><td>7. Penguatan Pengawasan</td><td>2,5</td></tr><tr><td>8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>2,5</td></tr><tr><td>II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN</td><td>10</td></tr><tr><td>III. REFORM</td><td>30</td></tr><tr><td>1. Manajemen Perubahan</td><td>3</td></tr><tr><td>2. Deregulasi Kebijakan</td><td>3</td></tr><tr><td>3. Penataan dan Penguatan Organisasi</td><td>4,5</td></tr><tr><td>4. Penataan Tata Laksana</td><td>3,75</td></tr><tr><td>5. Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>4,5</td></tr><tr><td>6. Penguatan Akuntabilitas</td><td>3,75</td></tr><tr><td>7. Penguatan Pengawasan</td><td>3,75</td></tr><tr><td>8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>3,75</td></tr><tr><td>TOTAL PENGUNGKIT</td><td>60</td></tr><tr><td colspan="2">B. HASIL</td></tr><tr><td>1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan</td><td>10</td></tr><tr><td>2. Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10</td></tr><tr><td>3. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN</td><td>10</td></tr><tr><td>4. Kinerja Organisasi</td><td>10</td></tr><tr><td>TOTAL HASIL</td><td>40</td></tr><tr><td>NILAI PMPRB</td><td>100</td></tr></table>	KOMPONEN PENILAIAN		A. PENGUNGKIT		I. Pemenuhan	20	1. Manajemen Perubahan	2	2. Deregulasi Kebijakan	2	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	3	4. Penataan Tata Laksana	2,5	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	3	6. Penguatan Akuntabilitas	2,5	7. Penguatan Pengawasan	2,5	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5	II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10	III. REFORM	30	1. Manajemen Perubahan	3	2. Deregulasi Kebijakan	3	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	4,5	4. Penataan Tata Laksana	3,75	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	4,5	6. Penguatan Akuntabilitas	3,75	7. Penguatan Pengawasan	3,75	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	TOTAL PENGUNGKIT	60	B. HASIL		1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10	2. Kualitas Pelayanan Publik	10	3. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10	4. Kinerja Organisasi	10	TOTAL HASIL	40	NILAI PMPRB	100	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kemenpan
KOMPONEN PENILAIAN																																																														
A. PENGUNGKIT																																																														
I. Pemenuhan	20																																																													
1. Manajemen Perubahan	2																																																													
2. Deregulasi Kebijakan	2																																																													
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	3																																																													
4. Penataan Tata Laksana	2,5																																																													
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	3																																																													
6. Penguatan Akuntabilitas	2,5																																																													
7. Penguatan Pengawasan	2,5																																																													
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,5																																																													
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN	10																																																													
III. REFORM	30																																																													
1. Manajemen Perubahan	3																																																													
2. Deregulasi Kebijakan	3																																																													
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	4,5																																																													
4. Penataan Tata Laksana	3,75																																																													
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	4,5																																																													
6. Penguatan Akuntabilitas	3,75																																																													
7. Penguatan Pengawasan	3,75																																																													
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75																																																													
TOTAL PENGUNGKIT	60																																																													
B. HASIL																																																														
1. Akuntabilitas kinerja dan keuangan	10																																																													
2. Kualitas Pelayanan Publik	10																																																													
3. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10																																																													
4. Kinerja Organisasi	10																																																													
TOTAL HASIL	40																																																													
NILAI PMPRB	100																																																													

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Daerah	LAKIP			Padang Sidempuan

24. SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG SIDEMPUAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1 Meningkatkan layanan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2 Indeks Kepuasan DPRD	3 Hasil Survey Kepuasan DPRD Rumus indeks = $\frac{\text{Total Skor Kepuasan Responden}}{Y} \times 100\%$ Y = skor tertinggi x jumlah responden Rumus : $T \times P_n$ Dimana : T = Jumlah Responen P_n = skor 1, 2, 3, 4, 5 Tahapan perhitungan sebagai berikut: 1. SP (Sangat Puas) = jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan 5 2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 4 3. KP (Kurang Puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3 4. TP (Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2 5. STP (Sangat Tidak Puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1 6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi total skor Kriteria Penilaian : 50%-60% = 50-59 = Kriteria nilai kurang baik 60%-79% = 60-79 = Kriteria nilai cukup baik	4 Sekretariat DPRD	5 Sekretariat DPRD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		80%-89% = 80-89 = Kriteria nilai baik 90%-100% = 90-199 = Kriteria nilai sangat baik		
Meningkatnya kinerja aparatur Sekretariat DPRD	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Sekretariat DPRD	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

25. KECAMATAN PADANG SIDEMPUNAN UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase urusan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah urusan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Umum	Kantor Camat Padang Sidempuan Utara
Meningkatnya Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kantor Camat Padang Sidempuan Utara
Meningkatnya kinerja aparatur Kantor Camat Padang Sidempuan Utara	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Kantor Camat Padang Sidempuan Utara	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

26. KECAMATAN PADANG SIDEMPUN SELATAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase urusan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah urusan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan Umum	Kantor Camat Padang Sidempun Selatan
Meningkatnya Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kantor Camat Padang Sidempun Selatan
Meningkatnya kinerja aparatur Kantor Camat Padang Sidempun Selatan	Nilai LKjIP / Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun.	Kantor Camat Padang Sidempun Selatan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun

27. KECAMATAN PADANG SIDEMPUN TENGGARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase urusan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah urusan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan	Kantor Camat Padang Sidempun Tenggara
Meningkatnya Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Kelurahan/Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/Desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kantor Camat Padang Sidempun Tenggara
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan	Kantor Camat Padang Sidempun Tenggara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja aparatur Kantor Camat Padang Sidempuan Tenggara	tertib dan baik Nilai LKJIP / Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Kantor Camat Padang Sidempuan Tenggara	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

28. KECAMATAN PADANG SIDEMPUN BATUNADUA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase urusan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah urusan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan	Kantor Camat Padang Sidempuan Batunadua
Meningkatnya Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Kelurahan/Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/Desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kantor Camat Padang Sidempuan Batunadua
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan	Kantor Camat Padang Sidempuan Batunadua
Meningkatnya kinerja aparatur Kantor Camat Padang Sidempuan Batunadua	Nilai LKJIP/Nilai LAKIP	Laporan Hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Kantor Camat Padang Sidempuan Batunadua	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

29. KECAMATAN PADANG SIDEMPUN HUTAIMBARU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase urusan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah urusan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan	Kantor Camat Padang Sidempun Hutaimbaru
Meningkatnya Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Kelurahan/Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/Desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kantor Camat Padang Sidempun Hutaimbaru
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan	Kantor Camat Padang Sidempun Hutaimbaru
Meningkatnya kinerja aparatur Kantor Camat Padang Sidempun Hutaimbaru	Nilai LKJP / Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun	Kantor Camat Padang Sidempun Tenggara	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempun

30. KECAMATAN PADANG SIDEMPUN ANGKOLA JULU

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase urusan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah layanan urusan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah urusan di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pelayanan	Kantor Camat Padang Sidempun Angkola Julu
Meningkatnya Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Kelurahan/Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pembangunan & Kemasyarakatan	Kantor Camat Padang Sidempun Angkola Julu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	masyarakat			
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan	Kantor Camat Padang Sidempuan Angkola J
Meningkatnya kinerja aparatur Kantor Camat Padang Sidempuan Angkola Julu	Nilai LKjIP / Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Kantor Camat Padang Sidempuan Angkola Julu	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

31. INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan	Level kapabilitas APIP	Penilai BPKP	Inspektorat	BPKP
	Maturitas SPIP	Penilai BPKP	Inspektorat	BPKP
Meningkatnya Kepatuhan/Kesadaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Menurunnya temuan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan Tahun lalu} - \text{Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan Tahun lalu}} \times 100\%$	Inspektorat	Inspektorat Kota Padang Sidempuan
	Persentase Tindaklanjuti temuan	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Temuan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Selesai}} \times 100\%$	Inspektorat	Inspektorat Kota Padang Sidempuan
Meningkatnya kinerja aparatur inspektorat	Nilai LKjIP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Inspektorat	Inspektorat Kota Padang Sidempuan

32. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pencapaian sasaran pembangunan daerah	Persentase Capaian Indikator sasaran daerah	$\frac{\text{Jumlah Capaian Indikator sasaran daerah}}{\text{Jumlah Indikator sasaran Daerah}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Sidempuan	OPD
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan (Nilai Komponen Perencanaan Kinerja)	Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Sidempuan	Kemenpan
	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomdir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomdir dalam Renja PD}}{\text{Jumlah Usulan Masyarakat yang menjadi prioritas Kecamatan}} \times 100 \%$	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Sidempuan	Baplitbangda Kota Padang Sidempuan
Meningkatnya kinerja aparatur perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Sidempuan	Nilai LKJP/Nilai LAKIP	Laporan Hasil Penilaian LAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Padang Sidempuan	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

33. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUNAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	$\frac{\text{Pendapatan Tahun } N - \text{Pendapatan Tahun } (N - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } N - 1} \times 100 \%$	Bidang Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempunan
Meningkatnya Pengelolaan Belanja Daerah	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100 \%$	Bidang Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempunan
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah, gedung bangunan milik Pemerintah Bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Tanah, gedung bersertifikat}}{\text{Jumlah Tanah, gedung belum bersertifikat}} \times 100 \%$	Bidang Asset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempunan
Meningkatnya kinerja aparatur BPKPD	Nilai LKJP/Nilai LAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempunan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempunan

34. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Rasio jabatan fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah ASN dengan jabatan fungsional bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah PNS (tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Aparatur, Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi	BKPSDM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Presentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah aparatur yang mengusulkan pelayanan administrasi kepegawaian}} \times 100 \%$	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 2. Bidang Kepegawaian 3. Bidang Pengembangan Aparatur, Penilaian Kinerja, Mutasi dan Promosi BKPSDM	BKPSDM
Meningkatnya Kinerja Aparatur Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai LAKIP LKJIP/Nilai	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan	BKPSDM	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

35. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Hak-Hak Politik Masyarakat	Angka Partisipasi Pemilih	$\frac{\text{Jumlah Pemilih Di Hari H} + \text{DPT (Daftar Pemilih Tambahan)} + \text{DPK (Daftar Pemilih Khusus)}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Sosial dan Politik	KPU Kota Padang Sidempuan
Meningkatnya Kesadaran Organisasi Masyarakat Untuk Keberadaannya	Presentase Organisasi Masyarakat Yang Melapor	$\frac{\text{Jumlah Ormas Yang Melapor}}{\text{Jumlah Ormas Keseluruhan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Organisasi Masyarakat / Kepala Seksi PNK	Kantor Kesbangpol
Meningkatnya Kesadaran Partai Politik Untuk Melapor Keberadaannya	Presentase Partai Politik Yang Melapor	$\frac{\text{Jumlah Partai Politik yang Melapor}}{\text{Jumlah Partai Politik Keseluruhan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Sosial dan Politik	Kantor Kesbangpol
Menurunnya Kasus Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Kasus Narkoba Pada Usia Sekolah	Jumlah Kasus Narkoba Pada Usia Sekolah (SD s/d SMA)	Kepala Seksi Sosial Politik / Kepala Seksi PNK	Kepolisian Resor Kota Padang Sidempuan
Meningkatnya kinerja aparatur Kantor Kesatuan	Nilai LAKIP/Nilai	Laporan hasil penilaian inspektorat Kota Padang Sidempuan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Inspektorat Daerah Kota Padang Sidempuan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Bangsa dan Politik			Kota Padang Sidempuan	

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 24 Des 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

